



UNIVERSITAS PERTAHANAN

**PEMBERDAYAAN DOKTER
SEBAGAI KOMPONEN PENDUKUNG PERTAHANAN NEGARA
DALAM STRATEGI KAMPANYE MILITER
(Studi di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Terapan
dalam bidang Ilmu Pertahanan

**AGUS WINARNA
NPM : 1 2012 01 04 040**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PROGRAM STUDI STRATEGI DAN KAMPANYE MILITER
JAKARTA
JULI 2014**

ABSTRAK

Nama : Agus Winarna
NPM : 120120104040
Program Studi : Strategi dan Kampanye Militer
Judul Tesis : Pemberdayaan Dokter Sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam Strategi Kampanye Militer (Studi di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang)

Sejarah perang kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa dokter memiliki andil yang besar dalam membangkitkan semangat perjuangan bangsa. Para Dokter Stovia saat itu telah berhasil mendirikan organisasi Budi Utomo yang mempelopori pergerakan perjuangan yang bersifat nasional untuk melawan penjajah.

Masalah penelitian yang diangkat adalah tentang pemberdayaan dokter pada saat ini dalam menunaikan hak dan kewajibannya dalam pertahanan Negara, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam Strategi Kampanye Militer (studi di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang).

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 21 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kerangka teoritis dari penelitian ini mengembangkan konsep pemikiran teori pemberdayaan sebagai teori utama dan didukung teori Prabowo tentang Kampanye Militer yang memiliki pandangan bahwa kampanye militer dibagi atas OMP dan OMSP yang didukung teori warga negara dari Thomas Davenport yang memiliki pandangan akan manusia (warga negara) tidak sekedar bagaimana mememanajemennya, tetapi juga melakukan investasi, serta menggunakan teori strategi dan teori sinergi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan Dokter dalam pertahanan Negara secara organisasi dan legalitas hukum belum terbentuk, namun dalam implementasinya sudah dilibatkan sesuai dengan kondisi darurat dalam OMSP. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemberdayaan dokter dalam penyelenggaraan Kampanye Militer diperlukan penanganan lebih lanjut tentang organisasi dan legalitas hukumnya oleh Kementerian Pertahanan, Markas Besar TNI dan Lembaga Kementerian terkait baik dalam bentuk Surat Keputusan Bersama, maupun formalisasi di tingkat legislasi sebagai bagian dari Komponen Pendukung.

Kata kunci : Pemberdayaan, Dokter, Komponen Pendukung, Pertahanan Negara, Strategi Kampanye Militer.

ABSTRACT

Name : Agus Winarna
NPM : 120120104040
Study Program : The Strategy and Military Campaign
Thesis Title : Empowerment of Doctor as the Nation Supporting
Component of Nation Defense in Military Campaign
Strategy. (A study in dr. Soedjono, Hospital, Magelang)

In the History of the Indonesian Independence war, The doctor has shown a great contribution in rising up the spirit of the nation to fight. At that time, the Stovia doctors have succeeded in establishing an organization named "Budi Utomo" that became the pioneer of the movements for Indonesia Independence nationally against the Colonial.

The issues of the research discussed is about the empowerment of the doctors at the current time in serving their rights and obligations of the nation defense, so the goal of this research is to know how to empower of the doctor as a supporting component of the Nation defense in strategy and military campaign. (A study in dr. Sardjono Magelang)

The approach or method used in this research is the qualitative method. The informants were chosen through the purposive sampling technique, and the sample comprised of 21 people. The data collecting technique is done through observation, interview and documentation.

The theory mainframe used in this research is using the empowerment theories as the main theory and it is supported by the Prabowo theory about military campaign which said that the military campaign is divided in to 2, the Military Operation of War (MOW) and the Military Operation Other Than War (MOOTW). Besides that, there is Thomas Davenport which has a perspective that a man (people of a country) is not only a matter of how to manage it, but we have to make an investment, and also we need to take into account the strategy and synergy theories.

The result of this research shows that the empowerment of the doctors in nation defense has not been existed in the form neither of organization or in its legal basis. However, in the implementation they have been involved in the emergency situation in the Military Operation Other Than War (MOOTW). Due to that facts, in realizing the doctor empowerment in running the military campaigns, further efforts should be taken in order to realize its organization form or in its legal basis by the Ministry of Defense the Indonesia Armed Forces Headquarters, and other Governmental institutions is needed. It can be realized in the form of the publication of Joint Decree or the formulation in the legislation level as a part of the supporting component.

Keywords: empowerment, doctor, supporting component, National defense, military campaign strategy.

DAFTAR ISI

SAMPUL		
JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7

1.3.2.	Manfaat Penelitian	7
1.4.	Ruang Lingkup dan Gambaran Desain	9
1.5.	Sistematika Penelitian	10
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
2.1.	Tinjauan Pustaka.	12
2.2.	Konsep Pemberdayaan	12
2.3.	Tinjauan tentang Dokter	14
2.4.	Tinjauan tentang Pemerintah	16
2.5.	Tinjauan Tentang Warga Negara	17
2.5.1.	Pengertian Warga Negara	17
2.5.2.	Ketentuan Hak dan Kewajiban Warga Negara	19
2.6.3.	Warga Negara Sebagai Human Capital	20
2.6.	Komponen Pendukung	21
2.7.	Kampanye Militer	22
2.8.	Teori Strategi	27
2.9.	Teori Sinergitas	31
2.10.	Hasil Penelitian yang Relevan	32
2.11.	Kerangka Pemikiran	33

BAB 3	METODE PENELITIAN	37
3.1.	Sumber Data/Subjek/Objek Penelitian	37
3.1.1.	Sumber Data	37
3.1.2.	Subjek Penelitian	37
3.1.3.	Objek Penelitian	38
3.2.	Desain Penelitian	38
3.3.	Pengertian Konseptual	38
3.3.1.	Kampanye Militer	38
3.3.2.	Komponen Pendukung	39
3.4.	Pengertian Operasional	40
3.4.1.	Kampanye Militer	40
3.4.2.	Komponen Pendukung	40
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	41
3.5.1.	Studi Pustaka	42
3.5.2.	Wawancara Mendalam	43
3.5.3.	Observasi	43
3.6.	Teknik Pemilihan Informan	43
3.7.	Teknik Analisis Data	44
3.8.	Waktu dan Lokasi Penelitian	45
BAB 4	ANALISA DATA DAN HASIL PENELITIAN	47

4.1.	Subyek Penelitian	47
4.2.	Sejarah Kementerian Pertahanan	48
4.3.	Struktur Organisasi Kementrian Pertahanan	52
4.4.	Pemberdayaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara	54
4.5.	Penyiapan Komponen Pendukung Pertahanan Negara	58
4.6.	Analisi Data dan Interpretasi Hasil	61
4.7.	Pembahasan	64
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN	82
5.1.	Simpulan	82
5.2.	Saran	83
5.2.1.	Saran Akademis	83
5.2.2.	Saran Praktis	83
	DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL	HAL
2.1.	Klasifikasi Penghuni Negara	20
2.2.	Komponen Pertahanan Negara	22
2.3.	Kedudukan Kampanye Militer Strata Perang	24
2.4.	Strategi Pertahanan Negara	30
2.5.	Kerangka Pemikiran	35
4.1.	Struktur Organisasi Kemhan	52
4.2.	Struktur Organisasi Ditkomduk Ditjen Pothan Kemhan	53
4.3.	Komponen Pertahanan Negara	56
4.4.	Total Defence	57
4.5.	Pengelolaan Sumdanas Untuk Pertahanan Negara	59

DAFTAR TABEL

NO	JUDUL	HAL
3.1.	Tabel Informan	44
3.2.	Jadwal Penelitian	46
4.1.	Hasil Penelitian di Lapangan	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Hal
1	Pedoman Wawancara	89
2	Daftar Informan	90
3	Transkrip Wawancara	91
4	Surat Keterangan Hasil Wawancara	121
5	Foto Kegiatan Hasil Wawancara	123

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penulis mengawali bagian ini dengan penjelasan tentang fenomena keterlibatan warga negara dalam kancah perjuangan nasional dengan menggali sejarah perang Diponegoro. Nasution dalam Pokok-Pokok Gerilya (2010) menyatakan bahwa:

“Jenderal Sudirman pernah mengisahkan bahwa sewaktu Pangeran Diponegoro diburu oleh Belanda, maka beliau lewat di depan pondok, seorang perempuan segera menyapu bekas kudanya dan waktu musuh datang, tiada dapat diikuti lagi jejaknya dan tiada seorangpun yang mengetahui”. (h. 25)

Nasution juga menyatakan bahwa:

“Perang memerlukan persiapan, memerlukan organisasi, pendidikan, perundang-undangan dan sebagainya, karena itu masa sekarang harus dipergunakan, supaya jangan seperti yang sering kita alami dahulu, baru sesudah pecah perang maka kita harus mengatur, harus menyesuaikan jalan pikiran, menyesuaikan organisasi dan lain-lain, dan banyaklah kekurangan yang tidak bisa lagi dikejar ”.

Sejarah tentang keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat dalam membantu perang sudah berlangsung sejak jaman penjajahan. Hal ini tidak selalu identik dengan memanggul senjata maupun terlibat langsung dalam suatu pertempuran. Namun, ternyata masyarakat dapat berperan sesuai keahlian dan profesinya guna membantu perjuangan melawan penjajah. Pemikiran Nasution selanjutnya adalah tentang pentingnya kesiapan perundang-undangan yang mengatur warga negara dalam pertahanan negara sebagai payung hukum agar tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum internasional tentang perang. Sejalan dengan sejarah tersebut, Lubis (2007:15) menyatakan bahwa ahli sejarah memanfaatkan bahan masa lampau dan disumbangkan pada ilmu politik dan membantu menentukan program ke masa

depan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti pemberdayaan dokter sebagai komponen pendukung pertahanan negara mengingat peran dokter pada masa kebangkitan nasional sangatlah mengagumkan. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya beberapa tokoh pahlawan yang berprofesi sebagai dokter, diantaranya adalah dr. Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T.) Radjiman Wedyodiningrat, dr. Wahidin Sudirohusodo dan dr. Cipto Mangunkusumo. Sejarah telah menuliskan bahwa :

“....., dr. Radjiman adalah satu-satunya orang yang terlibat secara aktif dalam kancah perjuangan berbangsa dimulai dari munculnya Boedi Utomo sampai pembentukan BPUPKI. Manuvernya di saat memimpin Budi Utomo yang mengusulkan pembentukan milisi rakyat di setiap daerah di Indonesia (kesadaran memiliki tentara rakyat) dijawab Belanda dengan kompensasi membentuk Volksraad dan dr. Radjiman masuk di dalamnya sebagai wakil dari Boedi Utomo”.

Saat ini, profesi dan keahlian dokter sebagai komponen pendukung pertahanan cenderung memiliki peran yang penting, namun belum diatur dan diberdayakan dalam suatu kegiatan pertahanan Negara. Sesuai dengan program kerja Direktorat Komponen Pendukung Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan sosialisasi tentang komponen pendukung masih terbatas dan dilaksanakan 6 kali dalam 1 tahun. Minimnya sosialisasi tentang peran serta warga Negara yang memiliki keahlian dan profesi dalam pertahanan negara membawa dampak yang lebih luas terhadap pemberdayaannya. Apabila Indonesia terlibat langsung atau tidak langsung pada situasi perang, tentu keterlibatan warga negara belum efektif untuk diberdayakan.

Presiden RI (2008) dalam sambutannya pada puncak Hari Bhakti Dokter Indonesia dalam rangka Seabad Kebangkitan Nasional dan Seabad kiprah Dokter Indonesia mengatakan:

“Tidakkah pada waktu itu tahun 1908, para pemuda, dokter-dokter muda yang memelopori sebuah gerakan kebangsaan yang pertama yang kemudian mendirikan organisasi yang kita sebut dengan Budi Utomo.

Nama dr.Wahidin Soedirohoesodo dan dokter-dokter yang lain telah terpatri abadi, telah tercetak dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang terus kita kenang, Oleh karena itu, IDI dan komunitas dokter memiliki tanggung jawab moral untuk memiliki semangat yang sama, memiliki komitmen, memiliki pengabdian, sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu, oleh dokter-dokter muda waktu itu yang telah mengubah jalan sejarah di negeri kita”.

Penjajahan Belanda (350 tahun) melahirkan semangat untuk terbebas dari belenggu penjajahan. Saat itu kumpulan para dokter muda mempelopori gerakan perjuangan dan membentuk organisasi perjuangan secara nasional pada tahun 1908 yang bernama Budi Utomo. Jika pada masa kebangkitan nasional para intelektual muda yang memiliki profesi dokter telah mengilhami perlunya seluruh lapisan masyarakat berjuang, maka di era reformasi saat ini perlu pula memikirkan bentuk pengabdian dan perjuangan dalam pertahanan Negara. Oleh karena itu, warga Negara yang memiliki profesi dokter sebagai bagian dari jutaan warga Negara Indonesia harus mewarisi sikap bela Negara dalam perspektif masa kini yaitu ikut terlibat dalam penyelenggaraan kampanye militer.

Badan Pusat Statistik (2010) mendata bahwa secara demografi jumlah warga negara Indonesia sebanyak 237.641.326 jiwa. Indonesia juga memiliki luas daratan mencapai 1.919.443 km², luas laut 3.257.357 km². Jumlah wilayah lautan dan daratan adalah 5.176.800 km². Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar tersebut akan memberikan keuntungan, tetapi di sisi lain juga akan merugikan bila tidak dikelola dengan baik. Jika dibandingkan dengan kekuatan TNI saat ini sekitar 470 ribu (Mabes TNI:2013) tentunya kekuatan TNI ini belum memadai. Dengan demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemberdayaan Komponen Pendukung Pertahanan Negara di luar TNI, sudah sangat mendesak untuk diatur penggunaannya dalam strategi kampanye militer. Dalam kaitannya dengan permasalahan negara saat ini, yang ditandai dengan berkembangnya konflik yang ada serta banyaknya bencana alam nasional, maka diperlukan pemberdayaan yang tepat bagi dokter untuk dapat dikerahkan sewaktu-waktu melalui mobilisasi dan demobilisasi pada saat

kampanye militer Operasi Militer Perang/Operasi Militer Selain Perang. Pemberdayaan dokter dalam kaitannya dengan kampanye militer dapat dijelaskan sebagai berikut : Di Indonesia sosialisasi tentang kampanye militer belum menyentuh seluruh masyarakat. Sebagian besar masyarakat baru mengenal dan memahami bela negara. Hal ini karena upaya bela negara telah diatur secara konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam UUD 1945 yang telah diamandemen, pada pasal 30 dengan tegas dinyatakan bahwa: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara” (Sekretariat Negara, 2010). Berkaitan dengan hak kewajiban warga negara ini dinyatakan juga oleh Suratman (2008:1), “Ketika dipandang dari sisi hak upaya itu terbuka bagi prakarsa yang bersifat sukarela dari warga NKRI, siapapun mereka, dan manakala dipandang dari sisi kewajiban, ia terbuka bagi proses pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah jika kondisi memungkinkan”.

Menurut UU Nomor 3/2002 bahwa penyelenggaraan Pertahanan Negara secara nasional merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah dengan TNI sebagai unsur utama pertahanan negara dibantu komponen cadangan dan komponen pendukung, guna menciptakan ketahanan bangsa dan negara dalam rangka terwujudnya Ketahanan Nasional Indonesia. Sistem pertahanan dalam sebuah negara sangat penting untuk menjaga kedaulatan bangsa Indonesia dari berbagai ancaman dalam bentuk perang baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk membuktikan bahwa perang itu selalu ada maka, Trevor Nevitt Dupuy pada tahun 1998 (dalam SSPS:2006) membagi sejarah peperangan mulai dari peperangan zaman purbakala (*Ancient*) 600 SM, sejarah perang zaman pertengahan (*Medieval*) 600-1500 SM, sejarah perang zaman modern tahun 1500-1750, sejarah perang abad revolusi 1750-1850, perang pada zaman munculnya kaum profesional tahun 1850-1950, Perang Dunia I tahun 1900-1925, Perang Dunia II dan permulaan jaman nuklir tahun 1925-1945, sampai dengan perang dingin yang berakhir pada tahun 1991.

Dari sejarah perang menurut Dupuy tersebut, dapat dikatakan bahwa

sepanjang sejarah peradaban manusia di dunia ini selalu ada perang dan dalam perkembangannya selalu mengalami kemajuan dari bentuk dan teknologi perang serta tujuan perang itu sendiri. Dengan kata lain, sejak munculnya peradaban manusia modern yang dimulai dari zaman bercocok tanam, dapat dikatakan dunia benar-benar relatif aman dari peperangan baru sejak 50 tahun yang lalu (Wahyono:2001).

Publius Flavius Vegetius Renatus pada tahun 395 juga menuliskan bahwa bila ingin damai, bersiaplah untuk perang. Konsep ini dinamakan *civis pacem para bellum* (Prabowo:2012). Selanjutnya, Prabowo (2012) juga menjelaskan bahwa ditahun 1840-an slogan heroik ini oleh kelompok *pasifism* dirubah menjadi *civis Pacem para pacem* (bila ingin damai, siapkanlah langkah-langkah untuk mewujudkan perdamaian).

Supandji (2009) mengatakan bahwa Komponen Pendukung meliputi warga Negara dan kekuatan, juga mencakup industri nasional serta sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana. Sedangkan, dalam acara sosialisasi Rancangan Undang-Undang KPPN (Komponen Pendukung Pertahanan Negara), Dirjen Pothan Kemhan RI (2012) menjelaskan bahwa Komponen Pendukung sebagai sub sistem dari sistem pertahanan negara menjadi salah satu elemen kekuatan pertahanan negara yang memperkuat dan memperbesar kemampuan Komponen Utama dan Komponen Cadangan dalam menghadapi ancaman militer, sekaligus menjadi bagian dari upaya penanaman kesadaran bela negara sebagai inti kekuatan pertahanan nir militer.

Hutabarat (2011) mengatakan bahwa komponen pendukung pertahanan negara secara legal formal belum ada aturan resmi yang mengatur. Dikaitkan dengan potensi dan prediksi ancaman maka sudah seharusnya keberadaan KPPN diatur oleh sebuah Undang-Undang. Minimnya sosialisasi akan semakin membuat masyarakat tidak memahami perannya selaku komponen pendukung, mengingat sosialisasi ini masih terbatas dan belum menyeluruh kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, sosialisasi tentang KPPN perlu

terus disebarluaskan kepada seluruh masyarakat sehingga diharapkan mendapatkan saran dan masukan yang membangun bagi pemberdayaan masyarakat dalam strategi kampanye militer.

Komponen Pendukung Pertahanan Negara tidaklah sama dengan melibatkan warga sipil dalam aplikasi strategi pertahanan Indonesia, khususnya tenaga ahli/profesi, tetapi justru menempatkan warga sipil yang dikategorikan komponen pendukung agar berperan sesuai keahlian/profesinya, sehingga dapat diberdayakan untuk ikut ambil bagian dalam penyelesaian konflik di masa damai maupun perannya dimasa perang saat menghadapi invasi musuh dalam strategi kampanye militer (Dikreg Sesko TNI TA. 2012). Dengan demikian, KPPN perannya tidak harus melaksanakan latihan kemiliteran serta bukan dijadikan “tameng” dalam menghadapi invasi musuh, akan tetapi membantu komponen utama dan komponen cadangan sesuai dengan keahlian dan profesinya.

Dalam mempertahankan Negara tidak hanya komponen utama saja, begitu pula ancaman Negara tidak hanya menghadapi OMP tetapi juga OMSP. Oleh karena itu, maka objek penelitiannya difokuskan kepada pemerintah/Kementrian Pertahanan RI dan warga negara yang memiliki profesi dokter. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **Pemberdayaan Dokter sebagai komponen pendukung pertahanan negara dalam Strategi Kampanye Militer (Studi di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang).**

1.2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang dapat diketahui bahwa masalah pertahanan negara oleh komponen pendukung masih terdapat kelemahan dari aspek legalitas dan terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat luas. Begitu juga masih terjadi silang pendapat antara pendapat yang pro dan kontra di kalangan eksekutif dan legislatif dalam mengambil suatu kebijakan pemberdayaan dokter sebagai komponen pendukung

pertahanan dalam suatu regulasi (Undang-undang komponen pendukung). Namun, dalam kenyataannya peran dan pemberdayaan dokter telah dilakukan terutama dalam penanganan Operasi Militer Selain Perang/OMSP. Dengan demikian, berdasarkan pada rumusan masalah tersebut dapat dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai berikut : “Bagaimanakah pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam Strategi Kampanye Militer di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang?”

1.3. Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara, mulai dari pendataan, pengklasifikasian, dan pengorganisasiannya, sehingga setiap saat siap untuk diberdayakan dalam penyelenggaraan kampanye militer non perang/OMSP maupun diberdayakan dari komponen pendukung menjadi komponen cadangan pada penyelenggaraan kampanye militer perang/OMP.

1.3.2. Manfaat Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan studi serta kajian tentang pentingnya pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam strategi Kampanye Militer, sehingga akan berguna bagi dunia akademisi maupun penerapannya oleh komponen pertahanan lainnya dalam pertahanan negara.

1.3.2.1. Manfaat Teoritis.

1. Memberikan masukan terhadap pengembangan ilmu Strategi

dan Kampanye Militer khususnya dalam memperluas diskusi tentang konsep perang semesta versi Indonesia dikaitkan dengan pelibatan warga negara yang memiliki profesi/keahlian dokter selaku Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

2. Memberikan masukan yang signifikan bagi para akademisi, peneliti dan pemerhati ilmu lainnya dalam pemberdayaan warga Negara yang memiliki profesi/keahlian dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dan perannya dalam strategi kampanye militer.

1.3.2.2. Manfaat Praktis.

1. Memberikan masukan kepada institusi-institusi pemerintahan khususnya Kementerian Pertahanan RI, tentang pemberdayaan warga negara yang memiliki profesi/keahlian dokter sebagai komponen Pendukung Pertahanan Negara yang ideal sesuai dengan Undang-Undang Pertahanan Negara.

2. Memberikan penjelasan kepada masyarakat yang memiliki keahlian/profesi dokter tentang peran dan kedudukannya dalam penyelenggaraan kampanye militer.

3. Mendapatkan kriteria dan klasifikasi pengelompokan warga negara profesi dokter dalam komponen pendukung pertahanan negara, yang siap dioperasikan dalam strategi kampanye militer non perang/perang.

4. Sebagai tolok ukur untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat yang memiliki profesi/keahlian dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

5. Sebagai salah satu sumber informasi dalam perencanaan dan pengerahan serta gelar Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

6. Membantu menempatkan anggota masyarakat yang memiliki profesi/keahlian dokter selaku Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam pelatihan dan pembinaannya.

7. Untuk mengetahui efektivitas dan hasil guna dari pendataan dan pengklasifikasian, antara lain: rekrutmen, seleksi, pelatihan dan penggunaan KPPN dalam strategi kampanye militer.
8. Dapat dijadikan masukan dalam menyusun *Standart Operating Procedure* (SOP) khususnya pemberdayaan dokter sebagai Komponen pendukung pertahanan negara dalam strategi Kampanye Militer.

1.4. Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian.

Penelitian ini dibatasi untuk menemukan jawaban dari pertanyaan pemberdayaan Dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam penyelenggaraan kampanye militer di mulai dari pengklasifikasian, pengelompokan, pengerahannya, serta pelatihan, pembinaannya dan kegunaannya bagi kepentingan nasional.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan secara holistik dengan deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode. Selanjutnya, hasil penelitian digunakan untuk analisis dengan menggunakan metode diskriptis analisis berdasarkan studi kepustakaan dan menganalisis pertanyaan-pertanyaan, tanggapan, pendapat dari kementerian pertahanan (Jajaran Ditkomduk) dan para dokter sipil dan militer di RS. dr. Soejono Magelang dan pejabat terkait di daerah meliputi Komandan Kodim, Ketua DPRD dan Ketua Komite dokter RS. dr. Soedjono Magelang.

Periode waktu penelitian mulai dari program sosialisasi Komponen pendukung oleh Kemhan pada tahun 2009 hingga tahun 2014 serta dokter di RS. dr. Soedjono tahun 2014 dengan lokasi penelitian di Jajaran Ditkomduk Ditpothan Kemhan RI Jakarta dan di RS. dr. Soedjono Magelang. Pertimbangan lokasi penelitian di Magelang adalah :

- a. Magelang merupakan kota perjuangan terkenal dengan “Basis Perjuangan Pangeran Diponegoro” dan Salah satu daerah yang dijadikan basis gerilya dalam perang kemerdekaan, sehingga sumber data yang akan diteliti mudah diperoleh karena memiliki *history* tentang perjuangan.
- b. Profesi/keahlian dokter telah efektif dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam erupsi gunung Merapi yang sering terjadi di daerah Magelang.
- c. Magelang adalah kota tempat pendidikan pembentukan perwira TNI, dengan adanya pendidikan Candradimuka Akademi TNI dan Akademi Militer serta banyaknya pangkalan militer sehingga dapat menjalin hubungan harmonis antara masyarakat Magelang dengan TNI.

Subyek penelitian adalah pejabat dilingkungan, pimpinan profesi dokter seperti Ketua Komite Dokter dan Kepala RS. dr. Soedjono Magelang, Komandan Kodim 0705/Magelang dan Ketua DPRD Magelang.

1.5. Sistematika Penelitian.

Sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (lima) bab yang diuraikan dalam penulisan sebagai berikut:

1.5.1. Bab pertama. Dimulai dari gambaran sejarah perjuangan bangsa serta menguraikan tentang latar belakang warga negara/profesi dokter serta kiprahnya dalam membangkitkan perjuangan para Dokter Stovia menurut sejarah memiliki andil yang besar termasuk dalam pemberdayaannya pada saat ini, disamping itu juga membahas tujuan dan manfaat penelitian, rumusan masalah penelitian, ruang lingkup dan gambar desain penelitian.

1.5.2. Bab kedua. Menjelaskan tentang Kajian pustaka dan kerangka pemikiran terhadap berbagai hasil penelitian ilmiah yang sudah pernah

dilakukan atau penelitian yang relevan terhadap topik penelitian tentang pemberdayaan warga Negara profesi dokter dalam kampanye militer, sehingga untuk menganalisis masalah dan tujuan penelitian selanjutnya diuraikan melalui teori-teori oleh para ahli/pakar yang dianggap relevan dengan pelaksanaan penelitian. Teori tersebut adalah Tinjauan tentang pemberdayaan, komponen pendukung, teori kampanye militer, teori strategi dan teori sinergi. Selain itu juga diuraikan kerangka pemikiran penulis.

1.5.3. Bab ketiga. Berisi penjelasan tentang metodologi penelitian meliputi sumber data primer maupun sekunder, desain penelitian yang meliputi teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam maupun studi literatur atau dokumentasi terhadap subyek dan objek penelitian, selanjutnya diuraikan juga teknik analisa data. Pada akhir bab ketiga ini akan dijelaskan prosedur penelitian terkait dengan rencana waktu dalam penyelesaian tesis dan tempat penelitian.

1.5.4. Bab keempat. Berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan dengan analisa data dari subyek penelitian dengan teori-teori pada tinjauan pustaka yang relevan. Titik berat pembahasan pada bagian ini adalah tentang pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam strategi kampanye militer, serta penelitian di Ditkomduk Ditjen Potan Kemhan dan RS. dr. Soedjono Magelang serta pejabat daerah (Dandim 0705/Magelang dan Ketua DPRD Kota Magelang).

1.5.5. Bab kelima. Berisi 2 (dua) bagian utama sebagai bagian akhir yang merupakan simpulan dan saran penelitian. Dalam simpulan dijelaskan bahwa simpulan sebagai temuan dalam penelitian serta menjawab rumusan masalah dan rekomendasi pemberdayaan dokter yang ideal dalam strategi kampanye militer sebagai solusi yang efektif bagi pembangunan pertahanan Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka.

2.2. Konsep Pemberdayaan.

Kata “*empowerment*” dan “*empower*” diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Menurut *Merriam Webster* dan *Oxford English Dictionary* (Priyono dan Pranarka, 1996:3) pemberdayaan mengandung dua pengertian yaitu pengertian pertama adalah *to give power or authority to*, dan pengertian kedua berarti *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.

Proses pemberdayaan dalam konteks aktualisasi diri berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kemampuan individu yaitu dengan menggali segala potensi yang dimiliki oleh individu tersebut baik menurut kemampuan keahlian (*skill*) ataupun pengetahuan (*knowledge*). Seorang tokoh pendidikan Paulo Freire, berpendapat bahwa pendidikan seharusnya dapat memberdayakan dan membebaskan para peserta didiknya karena dapat mendengarkan suara dari peserta didik (Jati : 2012). Dalam hal ini, yang dimaksud suara adalah segala aspirasi maupun segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Pada saat itu, mahasiswa dokter stovia juga ingin mengimplementasikan aspirasi dan potensinya sebagai kaum intelektual muda untuk mendirikan organisasi Budi Utomo dan mengawali kebangkitan

nasional yang bertujuan melawan penjajah dengan cita-cita Indonesia merdeka.

Pemberdayaan masyarakat menurut Kartasasmita (1996:159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan antara lain: *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); *kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*); *ketiga*, memberdayakan mengandung arti melindungi. Disinilah letak titik tolaknya, bahwa pengenalan setiap manusia dan setiap anggota masyarakat memiliki potensi untuk dapat terus dikembangkan, artinya tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak berdaya, karena kalau manusia tidak berdaya maka dengan sendirinya manusia tersebut akan mudah punah.

Pemberdayaan merupakan suatu upaya yang harus diikuti dengan tetap memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh setiap dokter. dalam rangka itu pula diperlukan langkah-langkah yang lebih positif selain dari menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta membuka akses kepada berbagai peluang sehingga akan menjadikan dokter menjadi semakin berdaya.

Menurut Parsons, et. al (1994, dalam Margianto dan Soebianto, 2013:160-161) menjelaskan bahwa pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu : *pertama*, pendekatan mikro yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap individu melalui bimbingan, *konseling*, *crisis intervention*, tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih individu dalam menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*); *kedua* pendekatan *mezzo* yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok masyarakat. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kelompok sebagai media intervensi, pendidikan dan pelatihan serta dinamika kelompok yang biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan serta sikap-sikap kelompok agar

memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi; *ketiga* pendekatan *makro*, pendekatan ini sering disebut juga dengan strategi sistem pasar (*large-system strategy*), karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang luas. Dalam pendekatan ini dijelaskan perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, pengorganisasian dan pengembangan masyarakat adalah beberapa strategi yang dijalankan. Pendekatan ini juga memandang klien (penerima manfaat) sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Konsep pemberdayaan juga merupakan suatu konsep alternatif pembangunan, yang intinya adalah memberikan tekanan otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung. Sebagai titik fokusnya adalah lokalitas, sebab dokter akan merasa siap diberdayakan lewat *isue-isue* lokal, seperti tuntutan masyarakat dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut Soetomo (2011:88) unsur utama dari proses pemberdayaan masyarakat adalah pemberian kewenangan dan pengembangan kapasitas masyarakat. Kedua unsur ini tidak dapat dipisahkan oleh karena bila masyarakat/dokter memperoleh kewenangan tetapi belum mendapatkan kapasitas untuk mengelola kewenangan maka hasilnya tidak akan optimal, karena masyarakat/dokter tidak berdaya/ *powerless*, sehingga tidak dapat mengatur masa depannya sendiri.

Dalam memberdayakan warga Negara yang memiliki profesi dokter selaku Komponen Pendukung Pertahanan Negara ternyata lebih luas karena tidak hanya sebatas ekonomi, pendidikan dan berbagai pendekatan tentang pemberdayaan saja namun juga secara politis dan pertahanan sehingga pada akhirnya dokter akan memiliki posisi tawar baik secara nasional maupun international serta bagaimana Pemerintah berupaya dalam mewujudkan kesadaran akan kewajiban warga negara dalam bela negara baik dalam kondisi perang maupun selain perang.

2.3. Tinjauan tentang Dokter

Secara operasional, definisi “Dokter” adalah seorang tenaga kesehatan (dokter) yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, berkesinambungan, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab profesional, hukum, etika dan moral. Berbicara tentang ruang lingkup dokter sebagai komponen pendukung pertahanan Negara, dokter juga termasuk di dalam kategori seorang tenaga medis atau bisa dikatakan juga tenaga kesehatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa : “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 262 Tahun 1979 yang dimaksud dengan tenaga medis adalah lulusan Fakultas Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan pascasarjana yang memberikan pelayanan medik dan penunjang medik. Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 dinyatakan bahwa Tenaga Medik termasuk tenaga kesehatan. Sementara itu, didalam aturan ini dinyatakan pula bahwa yang dimaksud dengan tenaga medis adalah mereka yang profesinya dalam bidang medis yaitu dokter, *physician* (dokter psikiater) dan *dentist* (dokter gigi). Tenaga medis/dokter juga memiliki kode etik kedokteran yang akan menanamkan seorang dokter dalam memandang profesinya untuk keluhuran sebagai dokter. Disini tugas mulia dokter akan diuji dalam pengabdian dan perannya dalam pertahanan Negara melalui keterlibatannya dalam strategi

penyelenggaraan kampanye militer baik Operasi Militer Perang/Militer Operasi Selain Perang.

2.4. Kebijakan Pemerintah.

Secara etimologi, pemerintahan berasal dari perkataan pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari perkataan perintah. Memang perkataan "pemerintah" dan "pemerintahan" merupakan rumusan yang dapat dibedakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Ermaya Suradinata (1998 : 6) Pemerintah adalah lembaga atau badan badan publik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.

Ndraha (2000:33) juga menjelaskan dari yang diperintahkan (*Reinventing People*), yaitu : Sebuah konsep yang isinya dapat dilihat. Konsep yang diperintahkan mengandung nilai-nilai : mahluk, manusia, orang, penduduk, warga masyarakat, warga bangsa, rakyat, *sovereign*, warga negara dan konsumen. Dalam penelitian ini yang dimaksud konsep Pemerintah adalah Kementrian Pertahanan RI sebagai pemangku kebijakan yang mempunyai tugas pemberdayaan warga Negara dokter selaku Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam penyeleng-garaan strategi kampanye militer.

Konsep kebijakan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *policy*. Jenkins (1978) mendefinisikan kebijakan sebagai berikut : "Seperangkat keputusan yang saling berhubungan yang diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan pemilihan tujuan dan sarana pencapaiannya dalam suatu situasi khusus dimana keputusan-keputusan itu seharusnya secara prinsip berada dalam kekuasaan para aktor tersebut untuk pencapaiannya". Bromley (dalam Hakim,1999) mengidentifikasikan 3 (tiga) tingkat hirarkhi kebijakan, yaitu : "*Policy level, Organizational level* dan *Operational level*. Pada masing-masing level ini kebijakan publik diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang undangan (*Institutional arrangements*) yang

sesuai dengan tingkat hirarkhinya selanjutnya dijelaskan juga bahwa : "Peraturan perundang-undangan ini baik secara sendiri maupun bersama-sama mempengaruhi pola-pola interaksi (*pattern of interactions*) di dalam masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan tersebut". Pola-pola interaksi inilah yang selanjutnya akan mempengaruhi hasil yang diinginkan oleh kebijakan tersebut. Kebijakan adalah peran pemerintah untuk mempengaruhi proses yang berlangsung dalam masyarakat.

Mustopadidjaja (1992) mengemukakan bahwa "kebijakan publik merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis yang dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu, kompleksitas dan dinamika tersebut akan lebih terasa apabila pengamatan diarahkan atau ditujukan pada proses kebijakan". Proses kebijakan itu dapat difahami sebagai rangkaian kegiatan yang meliputi sedikitnya 3 (tiga) kelompok utama, yaitu (1) pembuatan kebijakan; (2) pengendalian pelaksanaan kebijakan; dan (3) evaluasi kinerja kebijakan. Kebijakan pemerintah/Kemhan RI sesuai tugasnya dibidang pertahanan dan sesuai dengan politik Luar Negeri bangsa Indonesia "cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan", maka kebijakan dalam pertahanan adalah meletakkan pada tiga komponen pertahanan yaitu komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung yang sampai saat ini memedomani UU Nomor 3/2002 tentang Hanneg.

2.5. Tinjauan Tentang Warga Negara.

2.5.1. Pengertian Warga Negara.

Hikam (dalam Ghazalli, 2004) mendefinisikan warga negara yang merupakan terjemahan dari *citizenship* adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, istilah warga negara seperti yang tertulis dalam UUD 1945 pasal 26 dimaksudkan: "Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara". Dari sudut hubungan antara negara dan warga Negara, Koerniatmanto (2004) mendefinisikan warga negara dengan

konsep anggota negara. Sebagai anggota negara, warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya.

Selanjutnya, dalam pasal 1 UU Nomor 22/1958, dan dinyatakan juga dalam UU Nomor 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menekankan kepada peraturan, yang menyatakan bahwa Warga Negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi Warga Negara Republik Indonesia. Istilah warga negara secara umum mengandung arti peserta, anggota, atau warga dari suatu negara, yakni peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama (Tim *ICCE UIN* Jakarta:2008).

Warga negara dan penduduk memiliki pemahaman yang berbeda. Untuk membedakan warga negara dengan penduduk, selanjutnya akan diuraikan juga pemahaman tentang penduduk. Penduduk, menurut Soepomo (dalam Hadisoepipto, 1999) adalah orang-orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Orang yang berada di suatu wilayah negara dapat dibedakan menjadi penduduk dan non penduduk. Adapun penduduk negara dapat dibedakan menjadi warga negara dan orang asing atau bukan warga negara.

Secara demografi, jumlah warga negara Indonesia menurut data BPS (2010) yaitu sebanyak 237 641 326 jiwa. Dengan jumlah yang begitu besar ini, maka diperlukan perhatian dan pengelolaan yang serius terhadap warga negara karena memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kemajuan dan bahkan kemunduran sebuah bangsa. Oleh karena itu, seseorang yang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-Undang yang dibuat oleh negara tersebut. Sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih

dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28 E ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal dalam wilayah negara dapat diklasifikasikan menjadi WNI dan Penduduk yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia, adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk, yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa (surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju) yang diberikan negara melalui kantor imigrasi.

Perbedaan penduduk dengan WNI diatas, dapat dijelaskan bahwa Warga negara mempunyai hak dan kewajiban dalam bela negara, dan berbeda dengan Penduduk yang hanya tinggal dan bersifat sementara.

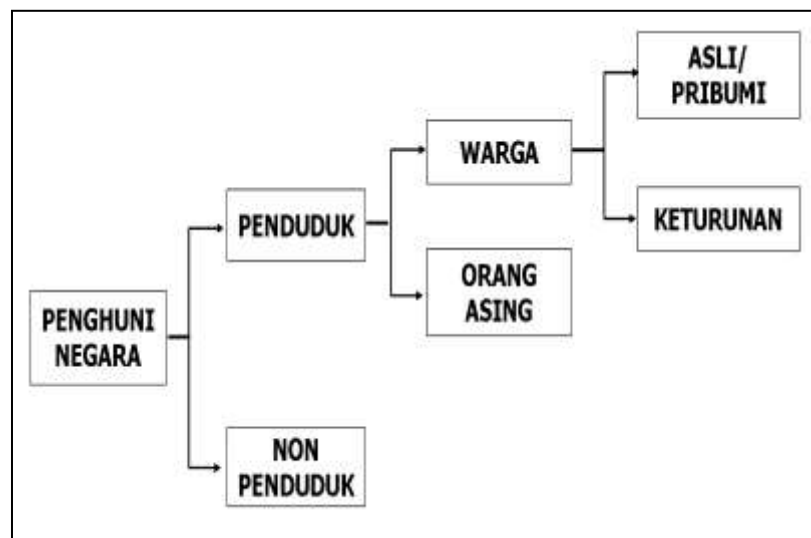
2.5.2. Ketentuan Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Untuk menjelaskan lebih detail tentang hak dan kewajiban warga negara, khususnya yang berhubungan dengan Kampanye Militer (Perpang TNI:2008) dinyatakan bahwa hubungan kampanye militer dengan pemerintah/politik dalam negeri adalah "Politik dalam negeri mempunyai peran penggalangan kekuatan rakyat dalam rangka menunjang kampanye militer". Berkaitan dengan itu dalam hal ketentuan lebih lanjut mengenai berbagai hak dan kewajiban warga negara dalam hubungannya dengan negara tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penjabaran atas UUD 1945. Sebagai contoh tentang hak dan kewajiban warga negara dalam komponen pertahanan negara sudah direalisasikan kedalam produk 3 (tiga) Undang-Undang yaitu (1) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; (2) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI; dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Prinsip utama dalam penentuan hak dan kewajiban warga negara

adalah terlibatnya warga (langsung atau perwakilan) dalam setiap perumusan hak dan kewajiban tersebut sehingga warga negara sadar dan menganggap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan mereka yang dibuat sendiri. Untuk memberikan penjelasan tentang posisi warga negara yang dimaksud dalam penelitian ini, maka diuraikan tentang klasifikasi penghuni negara seperti dalam bagan.

Gambar 2.1. Klasifikasi Penghuni Negara



Sumber: Soepomo dalam Hadisoeperto (1999)

2.5.3. Warga negara sebagai *human capital*.

Istilah modal manusia (*human capital*) dikenal sejak beberapa puluh tahun lalu ketika Gary S. Becker, seorang penerima Nobel di bidang ekonomi menulis buku yang berjudul *Human Capital* (Becker, 1964 dalam Agus Iman Solihin, 1995). Menurut Becker, human capital adalah bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (*capital*) yang menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka

mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Memahami *Human Capital*, penulis tertarik pada teori yang diketengahkan Thomas Davenport (1999) dalam Syarifudin Tippe (2012) yaitu :

“Human capital adalah sebuah pemikiran perusahaan yang melihat manusia sebagai modal terpenting korporasi. Oleh karena itu pandangan akan manusia tidak sekedar bagaimana memanajemennya, tetapi juga melakukan investasi atasnya. Sehingga konsep human capital identik dengan human investment”.(h. 36)

Di dalam buku tersebut juga dijelaskan bahwa:

“Sampai dengan tahun 1970-an konsep human capital adalah konsep yang menggagas tentang manusia sebagai modal sama pentingnya dengan modal-modal lain bagi organisasi, khususnya organisasi perusahaan. Dengan demikian maka manusia dianggap sebagai modal korporasi. Sebagai konsekuensinya maka perekrutan dan manajemen manusia dalam organisasi menjadi penting”.

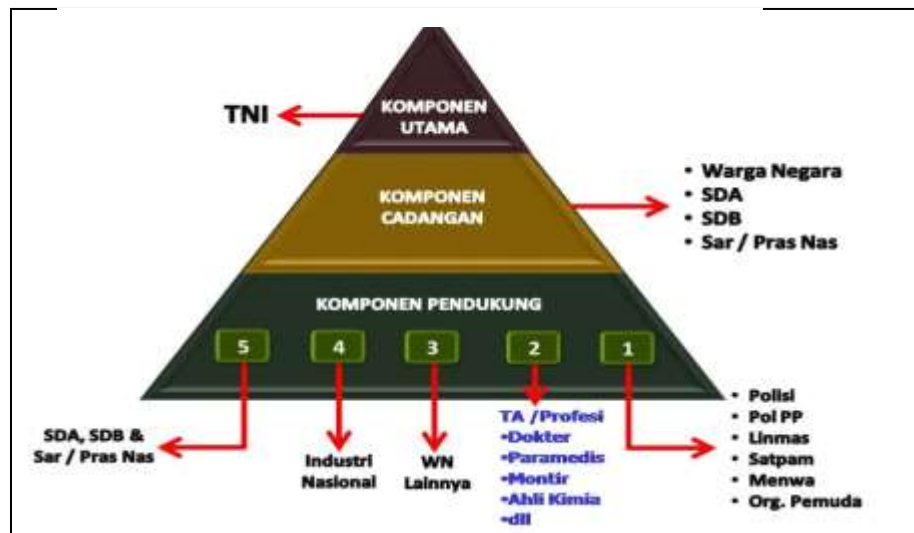
Dikaitkan dengan teori *human capital* penulis berpendapat bahwa dengan penataan dan pengklasifikasian warga negara yang memiliki keahlian/profesi dokter untuk dibina dan dikerahkan dalam kondisi kampanye militer adalah salah satu solusi yang tepat. Tidak semua warga negara otomatis menjadi komponen pendukung akan tetapi melalui proses perekrutan sampai dengan pembinaan. Oleh karena dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara adalah aset dan modal, maka dokter yang memenuhi persyaratan, akan mendapat pembinaan dan pelatihan untuk mengetahui perannya. Dokter juga setiap saat akan dapat dioperasionalkan dalam tugas kampanye militer, baik pada masa perang dan selain perang. Pada akhirnya harus ada upaya Pemerintah harus memberikan pemahaman kepada dokter, untuk secara sadar dan ikhlas diberdayakan dalam kapasitas selaku Komponen Pendukung Pertahanan Negara sebagai bagian dari hak dan kewajibannya dalam pertahanan negara.

2.6. Komponen Pendukung.

Menurut Buku Putih Pertahanan (2008), Komponen Pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung sebagai salah satu wadah keikutsertaan warga negara, sumber daya alam buatan dan sarana prasarana nasional dalam upaya penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, dalam buku ini juga dinyatakan “Komponen Pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam buatan dan sarana prasarana nasional yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan Komponen Utama dan Komponen Cadangan”.

Komponen Pendukung ditata dalam 5 (lima) segmen yang terdiri dari : para militer; tenaga ahli atau profesi; industri strategis; sumber daya alam buatan dan sarana prasarana nasional; serta warga negara secara individu maupun kelompok masyarakat. Khususnya tentang warga negara yang memiliki keahlian dan atau profesi dapat dijelaskan bahwa Tenaga Ahli dan atau Profesi merupakan warga negara yang mempunyai keahlian dan ilmu pengetahuan serta profesi yang dibutuhkan untuk kepentingan pertahanan negara. Sehingga, wajib mendarmabaktikan keahlian dan profesinya untuk pertahanan negara dan tidak memihak kepada lawan atau musuh negara yang berkaitan dengan pemanfaatan keahlian atau profesinya. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih detail tentang komponen pertahanan negara dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut :

Gambar 2.2. Komponen Pertahanan Negara



Sumber: Pemenhan Nomor : PER/23/M/XII/2007

2.7. Kampanye Militer.

Dalam bahasa Inggris kampanye militer disebut *campaign* yang menurut *Department of Defense Dictionary of Military Associated Term* dalam Prabowo (2012), *Campaign – A series of related major operations aimed at achieving strategic and operational objectives within a given time and space*. Dapat diartikan kampanye militer adalah rangkaian operasi yang ditujukan untuk menyelesaikan sasaran strategis dan operasional dalam waktu dan tempat yang tersedia. Kampanye militer didefinisikan sebagai rangkaian operasi militer (tidak harus operasi gabungan) yang saling berhubungan dan dilaksanakan dalam ruang waktu tertentu guna mencapai tujuan yang bersifat strategis, baik untuk kepentingan militer maupun kepentingan nasional. Selanjutnya, dalam buku tersebut, Prabowo menguraikan dari beberapa definisi yang ada tentang kampanye militer disimpulkan bahwa pengertian kampanye militer, secara substansial suatu penyelenggaraan operasi militer dapat dikategorikan kampanye militer bila; (1) tidak hanya satu tetapi merupakan rangkaian operasi militer; (2) tidak harus terdiri dari rangkaian operasi gabungan; (3) sasaran dan tujuannya bukan taktis tetapi strategis. Sasaran kampanye militer bisa berupa ibu kota suatu

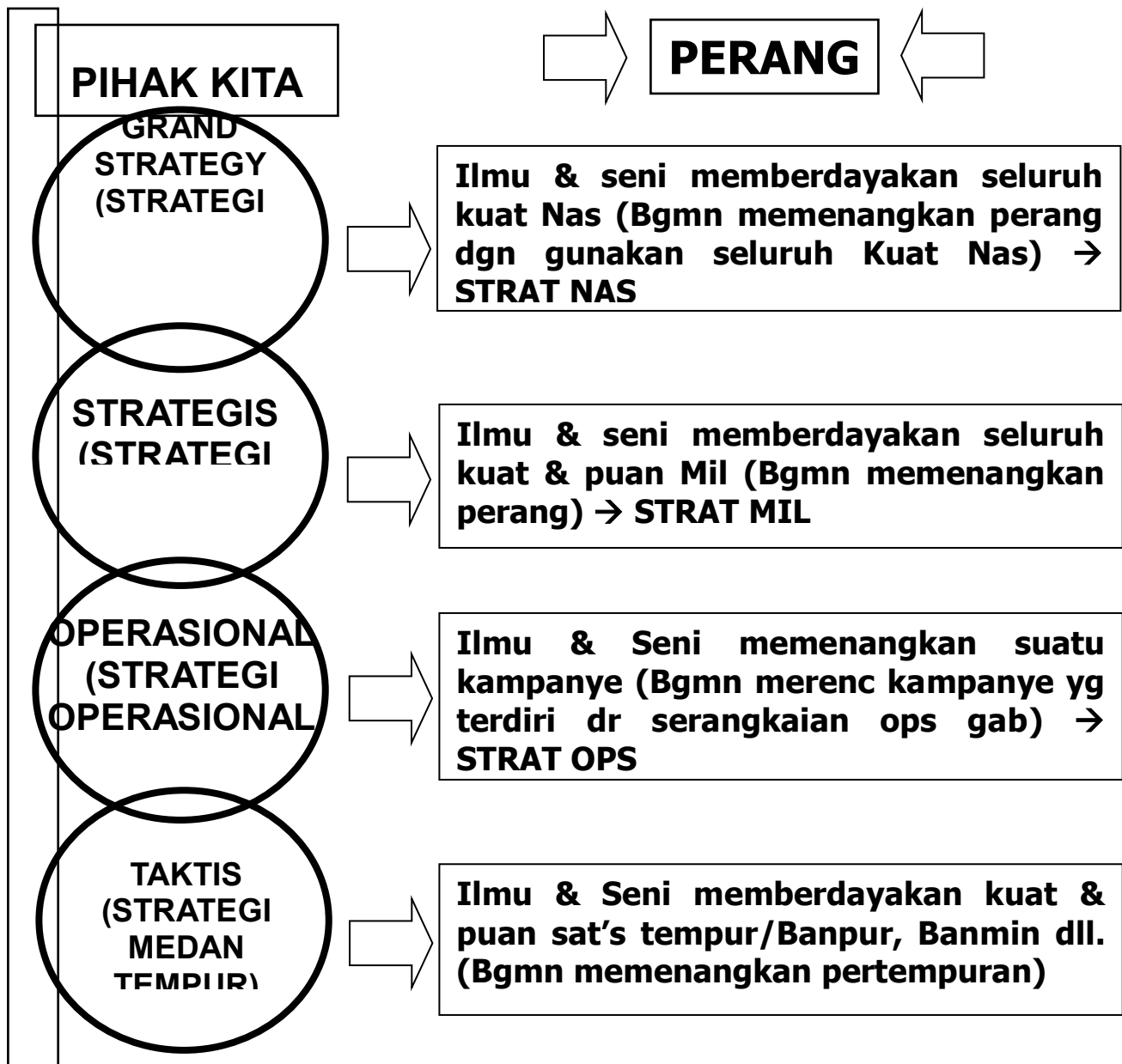
negara, bisa tokoh kunci, bisa juga hati dan pikiran (simpati) rakyat; (4) sasaran, dan daerah operasi kampanye militer umumnya kompleks yang luas; sehingga (5) penyelesaiannya memerlukan waktu lama, bisa beberapa minggu, bulan atau tahunan.

Kampanye militer dalam konteks strategi dinyatakan dalam Peraturan Panglima TNI, Perpang/15/IV/2008, yang menyatakan bahwa:

“Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, serentak untuk mencapai sasaran strategi dan operasi pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan serta melibatkan komando permanen dan komando non permanen/bentukan..., yang dirumuskan melalui perencanaan strategis maupun untuk menghadapi ancaman yang bersifat mendadak dan tidak disiapkan sebelumnya....., mengingat hal tersebut, maka penyelenggaraan kampanye militer tidak dapat dipisahkan dari kebijakan politik dalam pengerahan kekuatan TNI serta dipadukan dengan kekuatan nasional lainnya dalam rangka pencapaian tujuan nasional yang telah ditentukan”

Di dalam menjalankan perang dibagi dalam tiga tingkatan utama yaitu tingkat strategi (strategi raya dan strategi militer), kampanye (operasional) dan taktis, seperti yang dijelaskan dalam skema kedudukan Kampanye Militer dalam strata perang :

Gambar 2.3. Kedudukan Kampanye Militer dalam Strata Perang



Sumber: *Teori Kampanye Militer, (Sesko TNI:2012)*

Skema tentang kedudukan kampanye militer di dalam strata perang dipaparkan melalui seminar tentang Strategi dan Kampanye Militer (2013) dengan pembicara Dansesko TNI yang menjelaskan bahwa strategi memiliki strata yang analog dengan strata perang terdiri dari *Grand Strategy*, Strategi

Militer (*Sub-Grand Strategy*), Strategi Operasional dan Strategi Medan Pertempuran (Taktik).

Strata Strategi Nasional/Raya (*National/GrandStrategy*) merupakan strata strategi yang menggunakan/ memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk mewujudkan kepentingan nasional. Konsep strategi yang dirumuskan menggunakan bidang diplomasi, informasi, militer dan ekonomi selanjutnya dipadukan, disinergikan dan dikoordinasikan untuk mencapai cita-cita Nasional, tujuan dan kepentingan nasional. Konsep strategis yang dikembangkan adalah Strategi Pertahanan/Keamanan Nasional dirumuskan oleh Presiden dan Dewan Pertahanan/Keamanan Nasional disesuaikan dengan perkembangan lingkungan global, regional maupun lingkungan nasional. Konsep strategis tersebut mengarahkan pertahanan nasional, hubungan luar negeri, hubungan ekonomi yang diarahkan pada tujuan guna menciptakan kondisi yang mampu menopang kemampuan hubungan luar negeri dan postur pertahanan yang mampu menghadapi segala bentuk ancaman.

Strata Strategi Militer merupakan strata strategi yang memberdayakan seluruh kekuatan dan kemampuan militer serta merumuskan bagaimana cara memenangkan perang. Strata Strategi Militer terdiri atas Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan dan Kabalakpus TNI. Produk yang dihasilkan dari strata ini adalah Doktrin TNI, Doktrin Angkatan serta Rencana Perang TNI. Dan, Strata Strategi Operasional Militer merupakan strata yang bertujuan untuk memenangkan suatu Kampanye Militer dengan melaksanakan serangkaian Operasi Gabungan. Strata Strategi Operasional Militer terdiri atas Pangkogab/Panglima Mandala. Pada strata ini dirumuskan strategi operasi berupa perencanaan pelaksanaan Kampanye Militer dan rencana-rencana Operasi Gabungan (Opsgab).

Kampanye militer (*campaign*) yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan strategi. Pelaksanaan kampanye dinamakan seni operasi (*the operational art*), atau juga disebut strategi kampanye (*campaign strategy*). Sedangkan definisi Operasi adalah ilmu dan seni tentang penggunaan

kekuatan militer untuk mencapai tujuan dan sasaran kampanye yang ditetapkan dalam strategi (militer). Di militer juga ada taktik yang didefinisikan sebagai ilmu dan seni tentang pelaksanaan manuver pasukan dan penggunaan alat serta senjata untuk memenangkan pertempuran yang tujuannya telah ditetapkan dalam kampanye militer. Jadi sudah jelas bahwa strategi militer, operasi, dan taktik mempunyai hubungan timbal balik yang erat. Pelaksanaan strategi dan penentuan kampanye sangat mempengaruhi kemenangan perang di bidang militer. Selanjutnya, pelaksanaan operasi akan menentukan pertempuran, mempengaruhi keberhasilan kampanye, sedangkan pelaksanaan taktik menentukan kemenangan pertempuran. Sebaliknya, keberhasilan taktik diperlukan untuk memungkinkan keberhasilan kampanye, sedangkan keberhasilan kampanye sangat berpengaruh terhadap kemenangan strategi di bidang militer.

Rencana Kampanye Militer (*The Campaign Plan*) merupakan gambaran Operasi Gabungan yang direncanakan oleh Komando tugas Gabungan Wilayah maupun Komando Tugas Gabungan pada suatu Wilayah (Mandala) Operasi yang ditentukan. Rencana Kampanye Militer ini merupakan hasil proses perencanaan Operasi Gabungan yang menghubungkan perencanaan Kampanye Militer (*Campaign Planning*) yang dipersiapkan untuk menghadapi kontinjensi yang diperkirakan dengan perencanaan Kampanye Militer pada saat krisis. Oleh karena itu perencanaan Kampanye Militer meliputi proses perencanaan yang dipersiapkan dan perencanaan pada saat krisis yang dilakukan berdasarkan perkiraan strategi militer yang merupakan bagian dari strategi nasional.

Di dalam buku Operasi Militer, Prabowo (2012) mengatakan bahwa Kampanye Militer pernah dilakukan di Indonesia, di dalam negeri seperti operasi (Dwikora, Trikora dll) maupun luar negeri (operasi Komodo dan operasi seroja Tim tim tahun 1975-1976), Selain kampanye militer dalam rangka perang, Indonesia/TNI melaksanakan juga kampanye militer selain perang, dilakukan pertama kali pada saat penumpasan pemberontakan RMS di Ambon. Rangkaian operasi yang dilakukan pada saat itu meliputi operasi

gabungan meliputi operasi amfibi dilanjutkan dengan operasi tempur darat. Sedangkan, kampanye militer yang paling kompleks dan terdokumentasi dengan baik adalah operasi penumpasan PRRI di Sumatera. Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa kampanye militer bila ditilik dari pengoperasionalan alut sista, maka TNI juga pernah melakukan kampanye militer non tempur yang meliputi Kampanye Intelijen pada Operasi Prihatin dan Operasi Flamboyan di Timor Portugis pada awal tahun 1975 selama 1 tahun yang menghasilkan deklarasi Balibo yang ditandatangani pada tanggal 30 November 1975. Substansi deklarasi Balibo adalah mengundang/integrasi ke Indonesia dan ikut membantu konflik penyelesaian antara rakyat Timor yang ingin integrasi ke Indonesia dengan Fretelin yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 28 November 1975. Dijelaskan juga bahwa kampanye non tempur juga pernah dilakukan dalam rangka operasi Bhakti pada masa tanggap darurat pasca bencana alam Tsunami di Aceh.

Berdasarkan pada pemahaman tentang Kampanye militer tersebut maka Prabowo (2012) mendiskripsikan :

- a. Kampanye militer di Indonesia berbeda dengan kampanye militer di negara lain/AS. tetapi harus spesifik kampanye yang pernah dilakukan oleh TNI di Indonesia.
- b. Kampanye militer tidak hanya untuk perang tetapi juga ada kampanye militer selain perang.
- c. Pengertian sederhana dari kampanye militer adalah rangkaian operasi militer, dikarenakan operasi militer tidak hanya operasi tempur, maka kampanye militer dapat berupa antara lain kampanye darat, kampanye udara, kampanye laut, kampanye intelijen dan lain-lain.
- d. Kampanye militer tidak harus diawali dari luar ke daerah operasi, seperti operasi yang dilakukan saat ini, tetapi bisa juga operasi tersebut didelegasikan oleh Panglima di daerah seperti pada operasi Aceh, dimana Pangdam ditunjuk sebagai Penguasa Darurat Militer/PDMD dan Kasdam ditunjuk sebagai kepala staf gabungan.

Melalui pemahaman kampanye ini, penulis berpendapat bahwa kampanye militer di Indonesia tidak sama dengan penyelenggaraan

kampanye yang dikenal di Amerika Serikat dan sekutunya, tetapi suatu rangkaian operasi gabungan yang pada akhirnya juga melibatkan warga negara dalam perang semesta. Sesuai dengan perjalanan sejarah kampanye militer di Indonesia maka Operasi Militer yang akan datang, baik dalam OMP/OMSP, keterlibatan warga negara sipil akan selalu diperlukan. Oleh karena itu, kemampuan dan kekuatan bangsa Indonesia saat ini adalah pada rakyatnya.

2.8. Teori Strategi.

Penggunaan kata strategi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga menjadikan pengertian strategi menjadi sangat kompleks dan luas arti penggunaannya, tidak mengenal batas dan tidak saja dilingkungan militer sendiri, namun juga di bidang tehnik olah raga, perdagangan bahkan dalam pemenangan Pemilu pada sekalipun menggunakan istilah ini. Istilah strategi secara etimologis berasal dari kata bahasa Yunani "*strategos*" yang berarti pasukan dan "*agein*" yang berarti memimpin. Dalam militer istilah ini sering diartikan pula seni memenangkan perang melawan musuh dengan pemanfaatan kekuatan yang dimiliki secara maksimal. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu rencana dalam membagi dan mengerahkan kekuatan militer dan material pada daerah-daerah tertentu dalam mencapai tujuan tertentu.

Strategi Sun Tzu dalam *The art of war* (Greene : 2007) menjelaskan :

"Ketika senjata telah menjadi tumpul dan semangat tertekan, ketika kekuatan kita telah habis dan sumber-sumber daya telah terpakai, maka pihak lain akan memanfaatkan kelelahan kita untuk bangkit melawan kita. Maka meskipun Anda mempunyai jenderal yang bijaksana, Anda tidak mungkin meraih hasil yang baik pada akhirnya".
(hal 175)

Strategi Sun Tzu tersebut menekankan bahwa sumber-sumber daya penting dalam mendukung senjata. Sumber daya disini adalah penduduk yang memiliki profesi dokter dalam strategi kampanye militer di Indonesia. Untuk

membuktikan bahwa orang menjadi sangat penting dalam perang, dalam buku yang sama dikatakan Napoleon Bonaparte bahwa "Dalam perang yang penting bukanlah pasukannya, melainkan orangnya".

Menurut Greene (2007:257) pandangan perang dan strategi Carl von Clausewitz dalam *On War* dikatakan bahwa "Taktik Perang adalah perpanjangan politik dengan sarana lain". Selain itu, dikatakan juga bahwa "perang ialah teori mengenai penggunaan kekuatan-kekuatan militer dalam pertempuran." Sedangkan, strategi ialah teori mengenai penggunaan pertempuran untuk tujuan perang. Perang merupakan sarana untuk mencapai tujuan politik, disamping perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari konflik politik yang menggunakan cara lain (Hamim, 2009). Pelaksanaan perang itu sendiri bisa dilihat dari tiga sudut pandang hirarkhis, yaitu tataran strategis, operasional dan taktis. *Pertama* pada tataran strategis, perang harus dilihat sebagai sebuah permasalahan yang merupakan bagian dari hal-hal yang mengikuti proses hubungan antar negara. Pada tataran ini juga perang harus dilihat sebagai sebuah hal yang sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur di dalamnya, bahkan bisa dikatakan semua komponen suatu bangsa bisa di gerakkan dalam rangka perang. *Kedua* pada tataran operasional, perang bisa dilihat dari aspek pengerahan kekuatan militer. Dalam hal ini perang harus didasarkan pada perencanaan dan perhitungan yang tepat untuk memperoleh hasil yang maksimal. *Ketiga* pada tataran taktis, perang lebih banyak membahas bagaimana pasukan di medan pertempuran bertempur dengan cara-cara tertentu untuk mencapai kemenangan militer.

Dalam buku *Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia (2007)* dijelaskan bahwa :

"Dalam mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan menjamin keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman, upaya pertahanan negara diselenggarakan dengan Strategi Pertahanan Berlapis. Strategi Pertahanan Berlapis bertumpu pada upaya pertahanan negara yang memadukan pertahanan militer dengan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh. Karakteristik Strategi Pertahanan Berlapis diwujudkan melalui

keterpaduan pendayagunaan lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter yang saling menyokong dalam menghadapi setiap bentuk ancaman” (hal. 52).

Selanjutnya, dijelaskan pula bahwa strategi yang berkaitan dengan upaya warga negara selaku komponen pendukung dalam kebijakan strategi pertahanan negara juga ditegaskan bahwa :

“Lapis pertahanan militer merupakan kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer, tersusun dalam komponen utama serta komponen cadangan dan komponen pendukung. Pendayagunaan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer, baik dalam bentuk OMP maupun OMSP” (hal. 52)

Strategi Pertahanan menurut buku tersebut bertujuan untuk menghadapi perang berlarut dengan strategi pertahanan berlapis yang bertujuan untuk menangkal, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer dan ancaman nirmiliter dengan berpedoman pada cara pemecahan masalah antara lain *ends, means* dan *ways* nya .

Untuk lebih memahami strategi pertahanan ini dijelaskan melalui gambar sebagai berikut :

Gambar 2.4. Strategi Pertahanan Negara



Sumber : Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : PER/22/M/XII/2007

Hubungan antara Doktrin dengan Strategi tersebut dapat dijelaskan bahwa pada umumnya Doktrin Militer menetapkan hubungan antara *Ends* (apa yang harus dicapai) dengan *Means* (kemampuan) dan dengan *Ways* (cara-cara) bagi kekuatan militer untuk menyelesaikan Strategi Militer dan tujuan operasional dalam mendukung tujuan strategi nasional. Doktrin dan strategi saling mempengaruhi karena doktrin perlu strategi begitu pula halnya strategi juga perlu doktrin. Keberhasilan yang dicapai dari strategi yang digunakan sebelumnya dapat menjadi dasar untuk merumuskan doktrin. Tanpa adanya doktrin menyebabkan keputusan dari suatu strategi menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan karena doktrin memiliki kewenangan untuk mengarahkan strategi berdasarkan pengalaman yang sudah teruji sebelumnya. Menurut Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (2011) “Doktrin bukanlah strategi bukan juga operasional dan taktik, akan tetapi doktrin memberikan arahan bagaimana strategi dilaksanakan”.

Secara hierarki, konsep Strategi TNI adalah konsep Sub-Grand Strategi Militer yang merupakan bagian dari konsep Strategi Raya/Strategi Nasional (*grand strategy/national strategy*). Penyusunan konsep Strategi TNI

(Strategi Militer Nasional) merupakan tanggung jawab dan kewenangan Panglima TNI berdasarkan kebijakan-kebijakan Pemerintah/Negara yang terkait langsung dengan pembangunan, pembinaan, penggelaran, dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka pertahanan Negara Republik Indonesia. Konsep strategi pertahanan nasional ini dituangkan di dalam Strategi Keamanan Nasional yang merupakan Strategi Nasional/ Strategi Raya yang menjadi tanggung jawab dan kewenangan Menteri Pertahanan.

2.9. Teori Sinergitas

Pengertian Sinergitas menurut teori sinergitas *Stoner and Wankel* (1986) menjelaskan bahwa tingkat kerjasama yang terbaik adalah sinergistik yaitu kerjasama yang tinggi, saling mempercayai, dan terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. Dalam kaitannya dengan penjelasan tersebut, Perpres Nomor 7/2008 menyebutkan bahwa ; ” Doktrin pertahanan dan startegi pertahanan disusun untuk mensinergikan kinerja komponen militer dan nirmiliter dalam rangka menjaga, melindungi, dan memelihara kepentingan nasional Indonesia ”. Kepentingan nasional yang dimaksud disini adalah seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu tujuan negara.

Covey (1993) mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar. Selanjutnya, menurut Covey (1993) menjelaskan bahwa sinergitas akan mudah terjadi bila komponen-komponen yang mampu berpikir sinergi, terjadi kesamaan pandang dan saling menghargai. Secara operasional, berpikir sinergi dan kesamaan pandang dalam konteks mengembangkan upaya komponen pendukung dalam sistem pertahanan negara dapat diwujudkan antara lain dengan upaya dan keterlibatannya dalam penyelenggaraan kampanye militer.

Dalam tulisan ini, penulis memaknai sinergitas, dalam pemahaman yang merujuk pada kata sinergi. Sinergitas dalam kampanye militer berarti keterpaduan berbagai unsur komponen pertahanan, yaitu komponen utama

dan cadangan dibantu oleh komponen pendukung, sehingga dapat menghasilkan keluaran yang lebih baik dan lebih besar bagi pertahanan Negara seperti halnya dengan kemanunggalan TNI dan Rakyat adalah sinergi yang menghasilkan kekuatan yang dahsyat bagi pertahanan Indonesia.

2.10. Hasil Penelitian yang Relevan.

Tulisan yang dianggap relevan dengan masalah penelitian, terutama dengan komponen pertahanan Negara yaitu tulisan yang ditulis oleh Effendi Sihale dengan judul Konflik Vertikal di Papua pada tahun 1998–2011 dan Diskursus Komponen Cadangan Pertahanan Negara dalam Konteks Demokrasi Indonesia yang ditulis oleh penulis Edmund Gultom.

Dalam konteks Komponen Pendukung Pertahanan Negara dengan konflik bersenjata peneliti Efendi Sihole (2012) menulis situasi konflik vertikal di Papua pada tahun 1998 - 2011. Dalam temuannya Sihole melihat kondisi kemampuan intelijen dalam *early warning system* dihadapkan dengan kondisi geografi dan karakteristik ancaman kelompok separatis Papua. Hasil penelitian ini salah satunya merekomendasikan mendorong percepatan legalisasi RUU Komponen Cadangan dan Komponen pendukung untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap penanganan separatis di Papua.

Penelitian kedua dilakukan oleh Edmund Gultom dengan judul Diskursus Komponen Cadangan Pertahanan Negara Dalam Konteks Demokrasi Indonesia. Hasil penelitian ditinjau dari perspektif demokrasi dan hak asasi manusia, maka keberadaan KCPN adalah salah satu pilihan yang sesuai untuk membangun sistem pertahanan nasional, sepanjang keberadaan Undang-Undang ini diatur oleh peraturan perundang-undangan yang dirumuskan secara komprehensif dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi. Dari penelitian ini juga menekankan tentang pentingnya diadakan revisi terhadap *draft* RUU KCPN. Perbaikan/revisi harus dilakukan terhadap pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir dan ketidakjelasan, contohnya soal pendanaan KCPN sebagai bagian dari kebijakan pertahanan yang terpusat

dan dibiayai oleh APBN bukan daerah apalagi swasta serta perlu dikembangkan strategi komunikasi untuk menjangkau semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan pengusulan RUU KCPN tersebut. Saran penelitian lebih lanjut mengenai Komponen Cadangan Pertahanan Negara dapat diarahkan pada penyiapan Komponen Cadangan non sumber daya manusia yang bertujuan untuk mendukung logistik pertahanan nasional.

Berdasarkan pada penelitian sebelumnya komponen pendukung perlu diwujudkan terlebih dahulu karena pada dasarnya untuk mewujudkan komponen cadangan, seperti yang menjadi pertentangan saat ini, perlu dibentuk komponen pendukung. Komponen pendukung yang telah dibentuk melalui rekrutmen dan seleksi inilah yang akan menjadi calon komponen cadangan. Apabila pemerintah berupaya untuk melakukan sosialisasi dan langkah edukasi yang lainnya sejak dini kepada pelajar dan mahasiswa maka persepsi dalam pemberdayaan kepada warga negara profesi dokter untuk diikutkan dalam pertahanan negara akan menjadi lebih terarah sebab telah memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam pertahanan negara.

2.11. Kerangka Pemikiran.

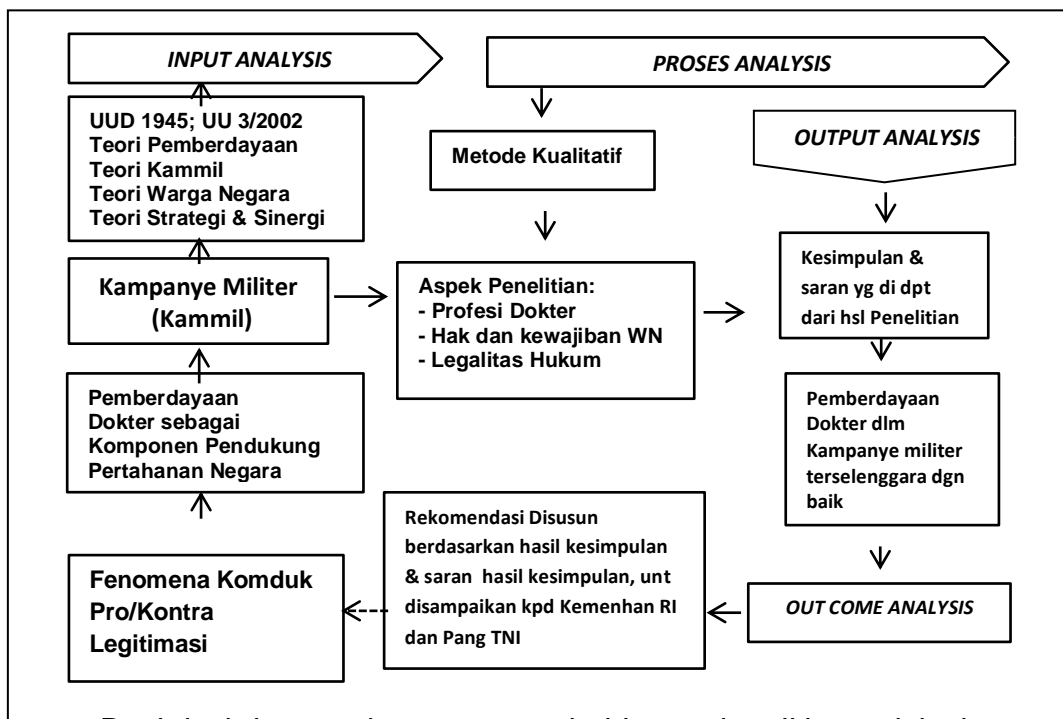
Penelitian ini mengkaji tentang pemberdayaan dokter yang berperan sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kampanye militer. Oleh karena itu, sebuah kajian dan pemikiran yang ilmiah dan mendalam mengenai pentingnya pemberdayaan dokter sebagai komponen pendukung pertahanan negara dalam strategi kampanye militer multlak diperlukan.

Penelitian ini difokus pada pemberdayaan dokter sebagai komponen pendukung pertahanan negara dalam strategi kampanye militer. Dengan demikian, landasan teori utama dalam menganalisis masalah penelitian yaitu menggunakan teori pemberdayaan dari pemikiran Talcott Parssons yang

menyatakan masyarakat (Dokter) haruslah dilihat dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya dan memiliki daya integrasi. Teori dan konsep lainnya yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka merupakan teori dan konsep pendukung untuk mempertajam analisis masalah penelitian sehingga diperoleh jawaban yang lengkap/ komprehensif atas pertanyaan penelitian.

Proses pemberdayaan dokter dalam penyelenggaraan kampanye militer ini jika divisualisasikan dalam sebuah kerangka pemikiran berdasarkan pada tinjauan pustaka maka dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2.5. Kerangka Pemikiran



Deskripsi dan gambaran umum dari kerangka pikir menjelaskan secara singkat berdasarkan pada pola pikir dengan uraian sebagai berikut: Konsep kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan warga negara selaku Komponen Pendukung Pertahanan Negara khususnya profesi dokter, erat kaitannya dan merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa dan proses Reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pemberdayaan profesi dokter dan salah satu solusi dalam menyeimbangkan antara kepentingan hak dan kewajiban serta

kepentingan keikutsertaannya dalam kampanye militer. Hak dan kewajiban warga negara dalam UUD 1945 mengamanat-kan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara“.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa hak dan kewajiban. Oleh karena itu, harus dibuat aturan perundang-undangan tentang siapa saja warga negara non kombatan yang dapat dilibatkan dalam perang/kampanye militer baik dalam kondisi OMP/OMSP. Hal ini sangat penting untuk dilakukan pengesahan Undang-Undang KPPN mengingat pentingnya keikutsertaan warga negara dalam kampanye militer dengan memberdayakan dokter untuk direkrut melalui wadah Komponen Pendukung Pertahanan Negara.

Di dalam penelitian ini penulis mengkhususkan penelitian pada profesi dokter karena pada masa perjuangan eksistensi dokter dan mahasiswa kedokteran Stovia di Batavia, seperti tertulis dalam buku-buku sejarah perang kemerdekaan, memiliki andil yang besar untuk mendirikan organisasi yang bersifat nasional dan organisasi yang berani melawan penjajahan yang sudah berlangsung 3,5 abad lamanya. Selanjutnya, untuk mengetahui pemberdayaan komponen pendukung yang sampai saat ini masih dalam tahap sosialisasi terbatas oleh Kemhan, maka perlu dilakukan penelitian yang lebih difokuskan pada pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam Strategi Kampanye Militer di Rumah Sakit dr. Soedjono Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teori utama yang digunakan untuk menganalisis masalah penelitiannya yaitu teori pemberdayaan dan didukung oleh teori kampanye militer dan teori/ konsep lainnya.

Masalah yang ditegaskan di dalam penelitian ini adalah pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam penyelenggaraan kampanye militer belum optimal. Mengembangkan konsep pemikiran teori pemberdayaan dari pemikiran Talcott Parssons yang menyatakan masyarakat (Dokter) haruslah dilihat dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya dan memiliki daya integrasi. Sebagai

teori utama dan didukung teori kampanye militer oleh Prabowo yang memiliki pandangan bahwa kampanye militer dibagi atas OMP dan OMSP, didukung teori warga negara dari Thomas Davenport yang memiliki pandangan akan manusia (warga negara) tidak sekedar bagaimana memanajemennya, tetapi juga melakukan investasi dan perekrutan dalam organisasi menjadi penting serta teori strategi dan sinergi adalah uraian dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Diharapkan dengan pemberdayaan dokter dalam pertahanan negara yang didukung fakta sejarah bahwa dokter memiliki andil pada masa pergerakan kebangsaan pada tahun 1908 akan mewakili warga negara/ masyarakat yang memiliki profesi/ keahlian lainnya di dalam struktur Komponen Pendukung Pertahanan Negara untuk dapat diberdayakan dalam penyelenggaraan kampanye militer, baik pada kondisi OMP/OMSP, sehingga pemberdayaan dokter selaku komponen pendukung pertahanan negara dalam penyelenggaraan kampanye militer oleh Pemerintah/ Kementrian Pertahanan dapat tercapai dengan optimal.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1. Sumber Data/Subjek/Objek penelitian

3.1.1. Sumber Data.

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2012:157) sumber data

utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam menentukan metode penelitian penulis menentukan sumber data dengan melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber primer maupun sekunder. Wawancara dilakukan kepada narasumber antara lain Dirkomduk Ditjen Pothan Kementerian Pertahanan RI dan Staf serta para dokter Militer dan Sipil, sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari hasil penelitian terdahulu, dokumen berupa buku, surat kabar, sumber elektronik dan sumber lainnya yang relevan dengan pemberdayaan dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara melalui upaya pemerintah dalam mengklasifikasikan, mengerahkan/ gelar dan membina warga negara yang memiliki profesi dokter dalam penyelenggaraan kampanye militer.

3.1.2. Subjek Penelitian.

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pemberdayaan Dokter dalam strategi kampanye Militer. Di dalam membuktikan apakah pemberdayaan Dokter sebagai Komponen Pendukung dapat dipahami oleh dokter itu sendiri, pada dasarnya akan dikembalikan kepada dokter sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara dalam strategi kampanye militer serta realisasi dan optimalisasi program kerja Kementerian Pertahanan cq Ditkomduk dalam pemberdayaan Komponen Pendukung.

3.1.3 Objek Penelitian.

Objek penelitian adalah informan atau narasumber yang diteliti terdiri dari 21 informan yang meliputi para Dokter, pejabat daerah terkait dan pejabat pemerintah (Dirkomduk Ditjen Pothan dan Staf). Objek penelitian yang lain adalah dokumen dari berbagai tulisan-tulisan ilmiah yang telah dipublikasikan berupa tesis, jurnal, artikel dan buku-buku referensi yang relevan dengan

pemberdayaan dokter di RS. dr. Soedjono. Dengan demikian dalam melakukan penelitian akan memerlukan data-data yang akan diambil melalui wawancara mendalam dan observasi serta penelaahan terhadap berbagai dokumen yang relevan. Hal ini sejalan dengan pendapat Husaini Usman (2006:73) bahwa “teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen”.

3.2. Desain Penelitian.

Desain penelitian merupakan tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian. Menurut Gulo (dalam Dwi Agung, 2012:29) desain penelitian adalah objek penelitian baru menjelaskan :

“Cetak biru penelitian yang memaparkan, apa, mengapa, dan bagaimana suatu masalah diteliti dengan menggunakan prinsip-prinsip metodologis yang telah ditentukan sebelumnya. Desain penelitian dapat dijelaskan secara parsial yang mencakup penggambaran tentang hubungan antar variabel, pengumpulan data, dan antara variabel yang ada dalam konteks penelitian dan apa yang hendak dilakukan oleh seorang peneliti dalam melaksanakan penelitian”.

Di dalam desain penelitian ini diuraikan berbagai hal meliputi definisi konseptual, definisi operasional, teknik pengumpulan data, teknik pemilihan Informan, teknik analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

3.3. Pengertian Konseptual.

3.3.1. Kampanye Militer.

Kampanye Militer merupakan rangkaian beberapa operasi gabungan yang dilaksanakan secara berurutan, serentak untuk mencapai sasaran strategi dan operasi pada suatu ruang dan waktu yang ditentukan serta melibatkan komando permanen dan komando non permanen/ bentukan. Kampanye militer dalam pengertian konseptual akan berhubungan dengan strategi perang, namun di era saat ini penggunaan dan taktik menjadi berkembang, tidak saja berhubungan dengan perang tradisional, namun juga hal yang berkaitan dengan non tradisional. Dalam menghadapi perang dimasa

mendatang sesuai UU 34/2004 tentang TNI dan pendapat para pakar dibagi menjadi operasi militer perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP). Kampanye Militer tidak harus merupakan operasi gabungan yang dilaksanakan oleh 3 (tiga) matra (Angkatan). Demikian berkembangnya pengertian kampanye militer tersebut, sehingga harus dikembangkan pula keterlibatan warga negara selaku komponen pendukung pertahanan negara khususnya warga negara yang memiliki keahlian/profesi.

3.3.2. Komponen Pendukung.

Komponen Pendukung Pertahanan Negara/profesi dokter pada hakekatnya adalah warga negara yaitu Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara. Disamping itu pengertian warga negara juga banyak diartikan oleh para ahli. Mengacu pada teori tentang warga negara oleh Davenfort, tidak akan terlepas dari hak dan kewajibannya selaku warga negara dalam pertahanan negara. Seberapa besar perbedaan antara hak dan kewajiban, tidak dapat dibandingkan dan dibedakan akan lebih penting yang mana antara satu dengan yang lain, tergantung kepada aturan dan mekanisme pada setiap perannya. Dokter sebagai warga negara disamping memiliki hak juga memiliki tanggung jawab terhadap bela negara khususnya keikutsertaannya selaku komponen pendukung dalam penyelenggaraan kampanye militer. Dengan demikian maka, Komponen Pendukung merupakan sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk mendukung kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

3.4. Pengertian Operasional.

Bertolak dari definisi konsep diatas, selanjutnya akan disampaikan definisi operasional dari variabel kampanye militer dan komponen pendukung. Definisi Operasional Variabel menurut Imam Chourmain (2008) adalah:

”Penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang lebih substantive dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sesuai dengan hakikat variabel yang sudah di definisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan proses atau operasionalnya alat ukur yang akan digunakan untuk kuantifikasi gejala atau variabel yang ditelitinya ”. (h.36)

3.4.1. Kampanye Militer.

Kampanye militer dalam konsep operasional disini diartikan bukan harus dalam hubungan operasi militer seperti rangkaian operasi gabungan yang melibatkan seluruh komponen utama saja, akan tetapi dapat berupa kampanye dalam OMP maupun OMSP (seperti penanggulangan bencana alam dan lain-lainnya), sehingga keikutsertaan warga negara sebagai komponen pendukung pertahanan negara dapat bersinergi dan diberdayakan dalam penyelenggaraan kampanye militer tersebut.

3.4.2. Komponen Pendukung.

Pengertian operasional yang dapat diuraikan disini adalah tentang komponen pendukung pertahanan negara dalam menunaikan hak dan kewajiban warga negara dalam penyelenggaraan kampanye militer baik dalam Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer selain Perang sesuai profesi/keahlian sebagai dokter. Warga negara sebagai komponen pendukung dalam hal ini adalah warga negara Indonesia yang memiliki profesi dokter militer dan dokter sipil yang berdinasi di Rs. Dr. Soedjono Magelang (bukan dokter yang berkebangsaan lain, contohnya dokter warga negara India, Arab, Cina, dll) yang memenuhi syarat untuk dapat menjalankan tugas dalam membantu penyelenggaraan kampanye militer.

3.5. Teknik Pengumpulan Data.

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui observasi *non-participant*, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan studi dokumen. Teknik observasi *non-participant* yaitu

pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan tujuan untuk menggali secara mendalam dengan cara berdialog untuk mengkaji pemberdayaan dokter dalam pertahanan negara. Wawancara mendalam ini digunakan peneliti untuk menggali informasi-informasi dari pengamatan, sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dokumentasi berupa catatan atau laporan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari para informan/aktor yang dijadikan sumber data yang dilakukan melalui wawancara mendalam secara bebas dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung melalui referensi berupa buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar dan sumber-sumber dokumen tertulis lainnya. Selama kegiatan penelitian, penulis menerapkan beberapa teknik pengumpulan data sesuai dengan aturan pelaksanaan penelitian ilmiah melalui wawancara dan observasi.

Seluruh data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan tiga tehnik pengumpulan data melalui proses wawancara, pencatatan di lapangan, dan dokumentasi yang akan diolah dengan mengkategorisasi dan menjabarkan ke dalam unit-unit. Kemudian data dianalisis dengan teknik triangulasi yaitu dengan menghubungkan data dari suatu sumber data dengan sumber data yang lainnya, kemudian dilakukan sintesa, menyusun ke dalam pola dan pada akhirnya membuat kesimpulan, sehingga mudah untuk dipahami. Serta teori teknik analisis data kualitatif yaitu dengan menggambarkan, menjelaskan, menggolongkan dan mengkonseptualisasikan data primer dan data sekunder melalui kata-kata, kalimat-kalimat, gambar-gambar, simbol, bagan, grafik, tabel, dan matriks. Langkah analisis data kualitatif ini adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang tertulis di lapangan.
- b. Melakukan verifikasi data, yaitu suatu bentuk penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis dan diuji secara empiris, sehingga dapat ditemukan pola hubungan diantara berbagai variabel yang diteliti.
- c. Melakukan penyajian data, yaitu langkah penyajian data dalam bentuk kata-kata, kalimat-kalimat, gambar-gambar, simbol, skema, bagan, grafik, tabel, dan matriks guna menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3.5.1. Studi Pustaka.

Teknik pengumpulan data pertama yang dilakukan oleh peneliti dengan menelaah teori-teori, pendapat-pendapat, serta pokok-pokok pikiran yang ada di media cetak khususnya buku-buku yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, sehingga membantu penulis untuk mendeskripsikan masalah secara mendalam dan jelas serta mengetahui keterkaitan antara masalah yang dikaji dengan masalah lain yang mempunyai hubungan. Sumber-sumber data yang dikaji dalam membahas teori-teori pendukung untuk masalah yang diteliti berasal dari data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai literatur dalam bentuk buku-buku, hasil-hasil seminar dan jurnal-jurnal, hasil-hasil penelitian dan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang relevan dengan masalah yang diteliti. Untuk mendukung kegiatan ini, peneliti memanfaatkan beberapa fasilitas perpustakaan yang ada selama proses kuliah dan penyelesaian penelitian antara lain Perpustakaan Universitas Pertahanan, Perpustakaan Mabesad, Perpustakaan Sesko TNI dan perpustakaan Akademi Militer.

3.5.2. Wawancara Mendalam.

Komunikasi yang dilakukan secara langsung melalui wawancara dari Informan, berguna untuk mendapatkan keterangan atau data yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini narasumber terdiri dari perwakilan berbagai pemangku kepentingan, diantaranya adalah 4 orang dari pejabat Kementerian Pertahanan, representasi dari badan yang menaungi profesi/keahlian seperti Ketua Komite Dokter dan Kepala RS. dr. Soedjono. Disamping itu, dilakukan juga wawancara terhadap 13 dokter di RS. dr. Soedjono Magelang dan pejabat daerah seperti Dandim 0705/Magelang dan Ketua DPRD Magelang.

3.5.3. Observasi.

Penelitian kualitatif ini memanfaatkan pengamatan secara langsung. Oleh Guba dan Lincoln dalam Gultom (2013:44) menyatakan alasan mengapa dalam penelitian ini mengutamakan pengamatan antara lain disebabkan bahwa teknik pengamatan didasarkan atas pengamatan langsung, melihat dan mengamati diri sendiri, langsung diperoleh data, sering terjadi keraguan pada peneliti, mampu memahami situasi yang rumit dan dalam kasus tertentu pengamat dapat jadi alat yang sangat bermanfaat.

3.6. Teknik Pemilihan Informan.

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Sampling bertujuan adalah suatu strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu. Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh. Informan ini dapat dipilih karena merekalah yang mempunyai pengetahuan banyak dan informasi mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti.

Penentuan informan menggunakan kriteria "Para aktor di Kementerian pertahanan yang mempunyai tugas pemberdayaan komponen pendukung

pertahanan Negara serta para dokter sipil dan militer yang bertugas di RS. dr. Soedjono Magelang pada tahun 2014 dan pejabat daerah terkait antara lain Dandim 0705/Magelang, Ketua RS. dr. Soedjono dan Ketua Komite Dokter RS. Dr. Soedjono Magelang". Dengan menggunakan kriteria tersebut maka informan dalam penelitian ini terdiri dari :

Tabel 3. 1. Tabel Informan

No	Instansi Informan	Jabatan	Ket (orang)
1	Kemhan	Dirjen Komduk Analis Madya Kasubdit Sarprasnas Kasi Warga Negara	4
2	Dokter RS. dr. Soedjono	Irfoman Kepala RS Ketua Komite Dokter	15
3	Infoman pendukung	Ketua DPRD Magelang Dandim 0705/Magelang	2

3.7. Teknik Analisis Data.

Analisa data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesakannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data juga dilakukan dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara apa adanya, baik yang berupa data dari hasil observasi maupun wawancara. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data penelitian kualitatif menurut Prasetya (dalam Mannan, 2010) :

- a. Pengumpulan Data Mentah. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data mentah melalui wawancara, observasi lapangan, kajian pustaka. Pada tahap ini peneliti membekali diri dengan membuat catatan-catatan dan membawa alat perekam suara. Pada waktu wawancara, sebenarnya analisa data sudah bisa dilakukan pada saat bersamaan.
- b. Transkrip data. Yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah merubah catatan peneliti ke bentuk tertulis (baik yang berasal dari tape recorder atau catatan tulisan tangan). Yang dicatat hanya data apa adanya.

- c. Pembuatan Koding. Dalam pembuatan koding ini, peneliti membaca ulang data yang sudah ditranskrip. Pembuatan koding dimaksudkan agar data-data dapat diorganisasikan secara rinci, lengkap dan sistematis, sehingga bisa memunculkan gambaran mengenai topik yang sedang diteliti. Umumnya, kode terpilih adalah kode yang mudah diingat dan secara tepat mewakili topik.
- d. Kategorisasi Data. Pada tahap ini peneliti menyederhanakan data dengan cara “mengikat” konsep-konsep atau kata kunci dalam satu besaran yang dinamakan kategori.
- e. Penyimpulan Sementara. Penyimpulan ini berdasarkan data murni tanpa ada penafsiran dari peneliti.
- f. Triangulasi. Yaitu proses cek dan recheck antara satu sumber data dengan sumber data lainnya.
- g. Penyimpulan Akhir. Kesimpulan akhir diambil ketika peneliti sudah merasa bahwa data sudah jenuh dan setiap penambahan data baru hanya berarti ketumpangtindihan.

Penjelasan dari Bogdan & Biklen (1982) ini digunakannya sebagai teknik analisa dengan tujuan bahwa dengan mengetahui langsung kepada sumber meliputi : wawasan pengetahuan mereka, ketertarikannya, posisi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan suatu kebijakan tentang hak dan kewajibannya selaku warga negara, serta adanya interaksi efektif antar semua komponen serta komitmen yang kuat dari semua pihak maka akan dapat menyukseskan satu kebijakan atau program, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemberdayaan dokter dalam penyelenggaraan kampanye militer.

3.8. Waktu dan Lokasi Penelitian.

Penelitian mulai dilakukan pada akhir bulan Mei 2013 sampai dengan Mei 2014. Lokasi penelitian berada di Jakarta dan Magelang, dengan rincian waktu Penelitian sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan selama 3 bulan, dimulai pada bulan September sampai dengan Bulan November 2013.
- b. Penyusunan Usulan Penelitian selama 2 bulan, yaitu pada Bulan November sampai dengan bulan Desember 2013.

